

## Road to JIF 2022, Jakarta Undang Swasta Kolaborasi Investasi EBT

Jakarta terus bergerak meningkatkan pengembangan energi terbarukan melalui panel surya, pemanfaatan air dan limbah, hingga transisi kendaraan listrik sebagai upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2050. Guna mendukungnya, Pemprov DKI Jakarta mengundang sektor swasta untuk berkolaborasi dalam berbagai proyek investasi di bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang akan ditampilkan dalam Jakarta Investment Forum (JIF) 2022 pada Agustus 2022 mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Agusandra menjelaskan, DKI Jakarta berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (*Greenhouse Gas/GHG*) sebesar 30% per tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut Benni mengajak pelaku-pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN DKI Jakarta untuk mengambil peluang ini.

“Peran swasta sangat kita butuhkan dalam mencapai hal ini. Para ahli, peneliti termasuk pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN diharapkan dapat mengambil kesempatan ini agar kita tidak selalu impor bahan-bahan PLTS jika terus menerus mengandalkan impor akan ada ketergantungan dan devisa kita akan lari terus keluar,” jelas Benni ketika ditemui di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta.

Guna mengeksplorasi berbagai proyek EBT potensial bersama para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya, Jakarta Investment Centre (JIC) yang merupakan unit pengelola di DPMPTSP menyelenggarakan *pre-event* menyambut JIF 2022 berupa webinar bertema “*Harnessing Renewable Energy Investment in Jakarta*” pada Senin (20/6).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini Kepala Bidang Energi, Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Edward Napitupulu; Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha; dan Wakil Ketua Bidang Energi dan Pekerjaan Umum KADIN DKI Jakarta, Afifuddin Kalla. Acara yang dimoderatori oleh Kepala JIC Tona Hutauruk ini mendapatkan sambutan baik dari para peserta. Sebanyak 145 peserta dari berbagai latar belakang, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat luas antusias mengikuti jalannya diskusi.

Kepala Bidang Energi Disnakertrans DKI Jakarta Edward Napitupulu mengungkapkan, saat ini Jakarta tengah mengembangkan sejumlah proyek EBT di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau bioenergi, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Hidrogen.

Edward menyebut, pengembangan PLTS sendiri ditargetkan mencapai 20 MW pada tahun 2025. Selanjutnya, kapasitas ini ditargetkan meningkat hingga 45 MW pada tahun 2035 dan 200 MW pada 2050 secara bertahap. “Per tahun 2020, posisi kita sekarang ini 5,0 MW. Target tahun 2025, kita sebenarnya harus ada 20 MW. Saya yakin target ini untuk tahun 2025 yang tinggal beberapa tahun lagi sebenarnya kalau boleh kita bilang tinggal dua tahun anggaran rasanya lompatan untuk membangun 15 MW dalam dua tahun ini akan sulit,” ujarnya.

“Tentu di sinilah peran swasta dan mungkin BUMD apabila memang harus diperlukan. Kita perlu mendorong peran swasta dan juga masyarakat banyak,” tambah Edward.

Pengembangan EBT di DKI Jakarta turut mendapat dukungan dari Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha. Ia pun mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera menetapkan Perda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dalam mencapainya.

“Tentunya nanti akan ada pendampingan dari Dewan Energi Nasional agar nanti sejalan dengan niatan Indonesia untuk melakukan transisi energi di mana capaian *net zero emission*-nya bisa tahun 2060 *or sooner*. Itu tekad dari Bapak Presiden,” ucapnya.

Ia menyampaikan, cadangan penyangga energi utamanya menjadi penting di tengah guncangan kondisi pasokan energi global saat ini. Untuk itu, investasi di sektor energi dalam rangka mendorong transisi energi menjadi hal yang harus didorong guna melindungi Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara dari dampak gejolak pasar internasional ke depan.



Satya mengungkapkan, tren investasi di sektor EBT seperti PLTS, PLTB, baterai, grid, hingga penjualan EV menunjukkan tren yang terus meningkat sepanjang tahun 2016-2020. “Nah, di tahun 2016-2030 kita melihat ada kecenderungan naik. Jadi kalau kita berbicara tentang *renewables*, potensi untuk naiknya investasi itu besar,” ucapnya.

Guna mendukungnya, ia pun mendorong peran serta sektor swasta untuk berpartisipasi dalam investasi transisi energi hijau. “Investasi transisi energi hijau sangat bergantung pada sumber keuangan publik dan swasta karena 70% diperkirakan dari modal swasta,” ujar Satya.

Mewakili sektor swasta, Wakil Ketua Bidang Energi dan Pekerjaan Umum KADIN DKI Jakarta Afifuddin Kalla mengatakan, PLTS Atap (rooftop PV) menjadi salah satu investasi EBT yang potensial di Jakarta. Hal ini menimbang ketersediaan energi matahari dibandingkan dengan sumber EBT lainnya.

“Sungai di Jakarta tidak ada, susah untuk dijadikan pembangkit listrik ataupun geothermal dan yang lain. Jadi memang yang paling besar dari DKI Jakarta yang bisa dikonversi menjadi EBT adalah dari solar panel,” ujarnya.

Ia pun mendorong agar Pemprov DKI dapat mendorong penggunaan PLTS Atap di setiap rumah warga maupun gedung-gedung perkantoran. Penggunaan bauran energi surya ini dinilai dapat mempercepat transisi energi di Jakarta.

“Kebetulan saya juga sudah memakai ini. Saya punya restoran di Jakarta Selatan dan sudah menginstal rooftop PV. Hasilnya lumayan karena ini bisa mengurangi tarif listrik saya ke PLN. Jika saya tidak pakai, ini bisa dijual kembali ke PLN. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat baik untuk bisa diimplementasikan di DKI Jakarta khususnya untuk rooftop PV ini,” ucapnya.

Afif menilai, sejumlah insentif pengembangan EBT yang telah diberikan pemerintah juga memberikan keunggulan bagi calon investor. Beberapa di antaranya yaitu *tax allowance* (pengurangan pajak korporat selama 6 tahun); *import duty facility* (bebas pajak impor bagi barang pendukung proyek EBT); dan *tax holiday* (pengampunan pajak selama 5-10 tahun).

Ke depannya, ia berharap agar pemerintah, PLN, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan koordinasi untuk menciptakan ekosistem EBT yang ramah bagi investor.

“Jadi memang harus ada koordinasi dari banyak pihak di sini untuk bisa membuat ekosistem EBT ini menjadi baik dan juga ke depannya lebih banyak lagi investor yang masuk dalam industri ini,” tandasnya.

Pemprov DKI Jakarta melalui JIC akan menampilkan beragam proyek investasi hijau termasuk EBT dalam perhelatan Jakarta Investment Forum (JIF) 2022 yang akan diselenggarakan pada Agustus 2022 mendatang. Forum ini menyediakan platform dan terbuka bagi calon investor untuk bertemu langsung dengan para BUMD pemilik proyek dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengeksplorasi berbagai proyek hijau potensial di Jakarta ke depan.

### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit Pelaksana yang tersebar pada Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perjalanannya, DPMPTSP memiliki Inovasi layanan guna memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada Warga Ibukota, diantaranya :

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Terintegrasi Melalui Mal Pelayanan Publik Jakarta, Starting a Business Corner atau Gerai Memulai Usaha, Jakarta Investment Centre, Jakarta Virtual Consultant for Business (JVC for B), Permohonan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pelayanan Online Jakarta Evolution (JakEvo), Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Mobil AJIB

Tanya PTSP 1500164, Antrian Online dan Lacak Berkas, Tanda Tangan Elektronik, Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Terpadu (SiPinter), One Day Service dan Fast Track, Jasa Arsitek Gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luasan dibawah 200 m2, IMB 3.0, PTSP Goes To Mall, Pelayanan Terpadu Keliling Kepulauan Seribu, Pelayanan Terpadu Keliling Kampung Kota, dll.

Berbagai pencapaian dan penghargaan bergengsi berhasil diraih oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun dari Lembaga Swasta yang kredibel di Indonesia, diantaranya:

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, sebagai Kepala Daerah Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari KemenPANRB; Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta - Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPANRB; Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Ir. Benni Agusandra, M.Si.

– Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari KemenPANRB;

Rekor Muri Instansi penerbit Perizinan dan Nonperizinan terbanyak dalam 1 tahun; Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) dari Ombudsman Republik Indonesia; Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dengan Kualifikasi "Sangat Inovatif" dari Lembaga Administrasi Negara (LAN); Realisasi Investasi PMDN tertinggi di Indonesia kategori lokasi proyek berdasarkan data BKPM; Pelayanan Publik Terbaik dari Kemenko PMK RI; Investment Award dari BKPM; Penghargaan Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 dari Kementerian Investasi/ BKPM

Platinum Awards (Juara Umum) Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2020 dan 2021 - Kategori Pemerintah Provinsi; Terpopuler di Media PRIA 2020 - Kategori Pemerintah Provinsi; Best Presenter PRIA 2020 dan 2021 - Kategori Pemerintah Provinsi; Gold Winner Departemen PR PRIA - Kinerja Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; Gold Winner PRIA - Media Sosial DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta @layananjakarta; Silver Winner PRIA - Video Profil Jakarta Investment Centre; Silver Winner PRIA - Pra Krisis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta; Silver Winner PRIA - Program Government PR Urus Izin Sendiri itu Mudah; Silver Winner PRIA - Program Digital PR Mini Seri di-AJIBin Aja.

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan nilai tertinggi (A) dari KemenPAN-RB; TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari KemenPAN-RB; Anugerah Aparatur Sipil Negara (ASN) kategori Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama Teladan dari KemenPAN-RB, Public Service of the Year Jabodetabek dari Markplus Inc.; Indonesia Attractiveness Award dari Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group – Tempat Investasi Terbaik Kategori Gold; Padma Award dari Kementerian Sosial Republik Indonesia; Juaram Umum Karnaval Jakarta Fair Kemayoran dari PT JIEXPO; Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta Peringkat 3 Kategori Dinas.

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 terdaftar Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Internasional Accreditation Forum (IAF) pada Ruang Lingkup Layanan dan Penyuluhan pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan; Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Bidang Pelayanan I; Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Bidang Pelayanan II; Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada UP PMPTSP Kecamatan Kalideres; dan Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada UP PMPTSP Kecamatan Mampang Prapatan.



#### Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta

Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22, Kuningan, Jakarta Selatan. [pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Informasi lebih lanjut hubungi Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta:

Aldi (081222377685)

Lidia (081315858600)